

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia melewati masa krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia pun memulai era baru, yakni era otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentralistik menuju sistem pemerintahan desentralistik. Artinya, sebelumnya pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam mengatur keuangannya menjadi daerah mengelola sendiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Bakri dan Rahardyan, 2022)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa setiap daerah telah diberikan kesempatan dalam melaksanakan kewenangan hak daerahnya. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tergantung pada kemampuan dan kemauan setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yaitu dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan, sedangkan pengukuran kinerja ialah pengawasan secara terus menerus terhadap pelaporan capaian kegiatan khususnya untuk

kemajuan atas tujuan yang sudah direncanakan. Kinerja mampu memberikan dampak yang positif jika dilakukan dan diawasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan ditingkat pemerintahan dan pembagian tugas serta kegiatan untuk mencapai suatu hal yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja keuangannya secara berkala dengan menggunakan beragam indikator. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperjelas tujuan dan tanggung jawab pemerintah, memberi informasi kepada masyarakat tentang kinerja keuangan, dan mendorong peningkatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Latifah dan Amalia, 2022)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah penerapan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis rasio keuangan daerah meliputi beberapa indikator seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan efisiensi. Dalam penelitian, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini berguna untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber pendapatan daerahnya untuk memperbaiki keadaan finansial dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga mewujudkan otonomi daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. (Alfi dan Sari, 2023)

Pemerintah harus kreatif dan inovatif untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, BPK dalam hal ini berperan aktif sebagai instansi yang mengawasi keuangan yang mengelola pemerintahan dan bersinergi untuk menciptakan output hasil kinerja pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik di semua sektor untuk masyarakat yang menjadi fokus utama hasil kinerja yang dilakukan pemerintahan. Setelah berjalannya reformasi, perubahan struktur dan segala hal yang terjadi di birokrasi pemerintahan tetapi tujuan akhirnya bermuara pada kinerja yang mampu melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya. (Kurnia, 2020)

Dasar pelayanan perbaikan pelayanan masyarakat dimulai dari peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan secara berkala untuk mengukur kinerja pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang – Undang No. 15 Tahun 2004, lembaga yang berwenang memeriksa kinerja pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tugas BPK terkait izin tersebut adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pemeriksaan dilakukan dengan standar yang berlaku guna menampilkan kebenaran, kejelasan, dan kredibilitas informasi sehubungan dengan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara yang nantinya akan

menghasilkan laporan pemeriksaan yang memuat temuan, kesimpulan, serta rekomendasi. (Kirana dan Sulardi, 2020)

Manajemen pemerintah dan pemerintah daerah harus mengelola dengan hati-hati dan menggunakan pendekatan manajemen yang ilmiah. Manajemen yang ilmiah dalam pengelolaan harus menerapkan sistem kontrol atau pengendalian manajemen. Dalam konteks pemerintahan, kita mengenal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi. SPI merupakan proses integral yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, manajemen pemerintah dan pemerintah daerah harus menyusun serangkaian sistem pengendalian. (Tjandrakirana et al., 2019)

Penyusunan sistem pengendalian internal bertujuan untuk mengamankan aset dan mengendalikan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu menyusun sistem pengendalian internal yang memenuhi persyaratan sistem pengendalian yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait. Dalam penyusunan sistem pengendalian internal, pemerintah harus memperhatikan elemen-elemen SPI seperti pengendalian lingkungan, aktivitas pengendalian, risiko pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jika SPI yang

disusun lemah atau belum ada, maka sumber daya yang dikelola dapat terbengkalai dan pemerintah berpotensi mengalami kerugian yang besar. (Tjandrakirana et al., 2019)

Karakteristik pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri tersendiri yang terdapat pada pemerintah daerah, yang menjadi ciri khas sebuah daerah, dan menjadi pembeda satu daerah dengan daerah lain. Kinerja keuangan dari pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah dimana karakteristik tersebut antara lain yaitu ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, dan tingkat ketergantungan. Ukuran pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah akan memudahkan kegiatan operasional yang tentunya juga melancarkan pelayananan kepada masyarakat, ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara tidak langsung, jikalau pemerintah berhasil memanfaatkan seluruh sumber potensi daerahnya serta mampu mengelola seluruh potensi-potensi daerahnya dengan baik. (Aulia dan Rahmawaty, 2020)

Kemakmuran pemerintah daerah juga dinyatakan sebagai karakteristik pemerintah daerah yaitu dapat diketahui dari total pendapatan asli daerahnya, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin makmur pula suatu daerah.

Kemakmuran dapat diukur dengan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang tercermin dari seberapa besar perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Perbandingan antara total dana perimbangan dan total pendapatan digunakan sebagai indikator tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat diturunkan dengan penggunaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pembangunan. (Aulia dan Rahmawaty, 2020)

Aulia dan Rahmawaty (2020) menyatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat diturunkan dengan penggunaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pembangunan. berasumsi bahwa pendapatan daerah memiliki andil besar, karena melalui pendapatan daerah tersebut dapat diketahui kemampuan daerah dalam hal mendanai aktivitas pemerintahan serta pembangunan daerahnya, sehingga pemerintah daerah berkenan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Pradana et al (2022) juga mengatakan konsep tingkat ketergantungan mencakup bagian dari pendapatan yang berasal dari sumber eksternal dan menggambarkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pemerintah pusat. Istilah tingkat ketergantungan lebih dikenal dengan dana perimbangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada tanggal 25 Juli 2023 meminta Pemerintah Provinsi Papua memberikan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana sejumlah Rp 1,5 triliun. Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD, Jhony Banua Rouw, SE, dalam sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun 2022 dan Raperdas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di kantor DPRD, Imbi, Kota Jayapura. DPR Papua masih memerlukan penjelasan tentang dasar penggunaan dan kriteria dari dana yang melebihi anggaran induk yaitu Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2022. Jhon menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas dana tersebut merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022. (Rambat, 2023)

BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur Papua untuk memberikan pertanggungjawaban terkait pengeluaran yang melebihi anggaran induk sejumlah Rp 1,57 triliun. Gubernur Papua telah mengumumkan rencana peraturan daerah Provinsi Papua yang membahas akuntabilitas pelaksanaan APBD tahun 2022. Dalam rencana tersebut, terdapat rincian mengenai pendapatan, dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 mencapai Rp 11,04 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 275,32 miliar dari anggaran pendapatan setelah perubahan yang semula sebesar Rp 10,76 triliun. Di sisi lain,

untuk belanja dan transfer daerah, realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp 11,45 triliun, mengalami penurunan atau memiliki selisih negatif sebesar Rp 1,45 triliun dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 12,91 triliun. Adapun untuk pembiayaan, realisasi pembiayaan pendapatan mencapai Rp 2,22 triliun dengan pengeluaran penyertaan modal sebesar Rp 20,0 miliar, sehingga pembiayaan bersih menjadi sebesar Rp 2,20 miliar untuk menutup defisit sebesar Rp 414,54 miliar. Oleh karena itu, sisa lebih pembiayaan pada tahun tersebut mencapai Rp 1,79 triliun. (Rambat, 2023)

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengklaim pelaksanaan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 pada umumnya telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Rumasukun menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Papua cukup baik, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun pada Mei 2023, BPK Papua telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun Anggaran 2022. Dalam laporan tersebut, BPK mencatat adanya masalah utama yang memengaruhi penyajian laporan keuangan, yaitu adanya realisasi belanja sebesar Rp 1,57 triliun yang melebihi anggaran induk dengan rincian yaitu belanja barang dan jasa sebesar Rp 403,70 miliar, belanja hibah sebesar Rp 437,44 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp 27,54

miliar, belanja modal sebesar Rp 566,11 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 141,02 miliar. (Rambat, 2023)

Fenomena yang terjadi memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al (2022) membahas tentang variabel ukuran pemerintah daerah dan tingkat kemakmuran daerah menunjukkan pemerintah daerah yang memiliki total aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, namun memiliki tingkat efektivitas yang rendah atau kurang efisien. Di sisi lain, ada juga pemerintah daerah dengan total aset dan PAD yang rendah, tetapi memiliki tingkat efektivitas yang tinggi atau sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah dengan total aset dan PAD tinggi memiliki tingkat efektivitas yang sama tinggi, begitu pula sebaliknya, tidak semua pemerintah daerah dengan total aset dan PAD rendah memiliki tingkat efektivitas yang rendah.

Tabel 1. 1
Data Karakteristik Pemerintah Daerah Provinsi Papua
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	13.978.117.822.487	14.602.974.636.829	14.763.746.028.757,00	8.942.541.460.543
PAD	938.055.365.341	1.185.019.353.229	1.765.651.609.757,00	1.237.275.778.543
Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	4.407.385.762.146	4.700.570.883.600	12.996.594.419.000,00	7.705.265.682.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	648.886.536.000	639.612.558.000	-	-
Dana Alokasi Umum	2.616.545.381.000	2.625.302.515.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	1.141.953.845.146	1.435.655.810.600	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.632.676.695.000	8.717.384.400.000	1.500.000.000,00	-
Aset	24.576.201.768.958,70	19.572.359.278.929	23.682.993.356.433	23.612.100.674.504,90
Aset Lancar	4.751.447.299.883,61	3.325.162.705.202	4.134.899.607.400	3.270.108.797.026,80
Investasi Jangka Panjang	1.090.146.279.591,30	980.289.390.603	1.284.352.401.090	1.261.587.449.344,36
Aset Tetap	17.579.086.986.777,60	14.272.926.464.505	17.003.543.146.105	17.922.725.953.178,30
Dana Cadangan	1.020.159.344.780,00	966.286.635.957	1.174.797.615.936	918.567.915.952,00
Aset Lainnya	135.361.857.926,23	27.694.082.662	85.400.585.901	239.110.559.003,44

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, <https://bpkad.papua.go.id/>

Pada data yang sudah diambil selama tahun 2019 – 2021, total aset mengalami fluktuasi, tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kemudian naik kembali pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan dari tahun 2019 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Terakhir, dana

perimbangan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, tetapi kemudian kembali menurun pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau perubahan dalam alokasi dana pada tahun tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al (2022) menyimpulkan tidak semua provinsi dengan total dana perimbangan yang besar menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya, tidak semua provinsi dengan total dana perimbangan yang rendah menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Dari perbandingan ini, dapat dilihat tren pertumbuhan atau penurunan dalam total pendapatan daerah, PAD, dan dana perimbangan dari tahun 2019 hingga 2022 untuk karakteristik pemerintah daerah Provinsi Papua.

Tabel 1. 2
Data Temuan Audit

Tahun	Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Papua
2019	Menurut laporan IHPS II tahun 2019, terdapat tujuh temuan serta sepuluh permasalahan yang berkaitan dengan ketidakefektifan dalam kinerja pemeriksaan pada pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut mencakup evaluasi terhadap penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk tahun anggaran 2017, 2018, dan triwulan I 2019, yang dilakukan di pemprov dan pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Papua beserta instansi terkait lainnya.
2020	IHPS I Tahun 2020 melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Dari hasil tersebut, satu pemerintah daerah belum mengirimkan laporan keuangannya kepada BPK, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.
2021	IHPS I tahun 2021 memuat Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dengan objek pemeriksaan yaitu Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua terdapat 6 jumlah temuan dan 6 permasalahan untuk temuan ketidakefektifan. Pada semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas pemeriksaan objek pada pemda dengan tema penguatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilaksanakan di Provinsi Papua, yaitu Pemkab Keerom, Pemkab Kepulauan Yapen, dan Pemkab Sarmi
2022	Pada semester I tahun 2022, BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Sebanyak 1 pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK

Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihps>

Pada data yang sudah didapatkan diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis temuan BPK Provinsi Papua dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan adanya masalah pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu dan kurangnya ketaatan dalam menyampaikan laporan keuangan, masalah dalam pengelolaan dana otonomi khusus, dan tantangan dalam pelaksanaan program infrastruktur. Temuan ini menegaskan perlunya langkah-langkah perbaikan dan berkelanjutan dari pemerintah daerah Papua untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan di wilayah tersebut. Penelitian oleh Alfiani et al (2017) menyatakan dalam standar pelaporan tambahan kedua pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Tabel 1. 3
Data Sistem Pengendalian Internal Provinsi Papua

Tahun	Sistem Pengendalian Internal Provinsi Papua
2019	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) atas Pengelolaan Belanja Daerah terdapat 9 permasalahan sitem pengendalian internal di Provinsi Papua, objek Pemeriksaannya yaitu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Keerom, Sarmi, Waropen dan Entitas terkait lainnya. Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah terdapat 7 permasalahan sistem pengendalian internal dengan objek pemeriksaan yaitu Manajemen Aset Per Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Entitas Terkait Lainnya di Biak
2020	IHPS I Tahun 2020 memuat Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 terdapat temuan entitas terlambat menyampaikan laporan sebanyak 4 entitas, dari data ini tidak dicantumkan nama pemerintah daerah,namun dari temuan SPI tersebut berhubungan dengan temuan bpk pada pemeriksaan LHP dimana dari Provinsi Papua ada 1 pemda yang belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK
2021	IHPS I Tahun 2021 memuat Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah terdapat 2 kelemahan sistem pengendalian intern dengan objek pemeriksaan yaitu pengelolaan belanja daerah infrastruktur dari pemeriksaan tersebut adapun nilai temuan sebesar 1.987,82 juta, dari data yang didapat di IHPS I tahun 2021 tidak disebutkan nama pemerintah daerah namun dari temuan BPK pada pemeriksaan LHP terdapat hubungan di Pemerintah Daerah Provinsi Papua yaitu adanya pemeriksaan kinerja atas efektivitas dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui program Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2022	IHPS I Tahun 2022 memuat Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2021 terdapat temuan entitas terlambat menyampaikan laporan sebanyak 6 entitas, dari data ini tidak dicantumkan nama pemerintah daerah,namun dari temuan SPI tersebut berhubungan dengan temuan bpk pada pemeriksaan LHP dimana kembali lagi dari Provinsi Papua ada 1 pemda yang belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen

Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihips>

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya konsistensi dalam temuan kelemahan SPI terkait pengelolaan belanja daerah, aset daerah, dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh beberapa entitas di Provinsi Papua dari tahun 2019 hingga 2022. Temuan ini mencerminkan perluasan dan kedalaman pemeriksaan serta ketidaksempurnaan dalam sistem pengendalian internal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di wilayah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al (2022) menunjukkan bahwa tidak semua provinsi yang memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang rendah memiliki rasio efektivitas yang tinggi, sebaliknya tidak semua provinsi yang memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang rendah atau kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Bakri dan Rahardyan (2022) dengan judul pengaruh opini, temuan, dan karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan dan karakteristik pemerintah daerah secara bersamaan mempunyai dampak besar terhadap kinerja keuangan, namun opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah dan Amalia (2022) dengan judul pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang meliputi ukuran pemerintah, belanja daerah, dan ukuran legislatif berpengaruh

terhadap kinerja keuangan sedangkan tingkat ketergantungan, temuan audit, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al (2021) dengan judul pengaruh karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit, dan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tjandrakirana et al (2019) dengan judul pengaruh laporan hasil pemeriksaan, ketidakpatuhan pada peraturan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan hasil pemeriksaan, ketidakpatuhan pada peraturan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pradana et al (2022), namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat, tahun dan variabel Penelitian. Dimana Arta Pradana, Sunardi, Muhammad Fahmi melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2019 dan Populasi penelitiannya adalah 60 kabupaten/kota di wilayah tersebut, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua tahun 2019-2022 dan penambahan

variabel penelitian yaitu temuan audit dari penelitian yang dilakukan oleh (Manoppo et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan antara karakteristik pemerintah daerah, temuan Audit, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul **“Pengaruh Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah, Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua?
2. Apakah kemakmuran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Papua?
3. Apakah tingkat ketergantungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua?
4. Apakah temuan audit atas kepatuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua?
5. Apakah temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kemakmuran memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Papua.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan tingkat ketergantungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan temuan audit atas kepatuhan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Teoritis

1. Dapat berkontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan akuntansi yang berfokus pada akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan di Provinsi Papua.
2. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal dengan kinerja keuangan di Provinsi Papua.

1.4.2 Bagi Praktisi

Diharapkan bermanfaat untuk responden yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua sebagai gambaran mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan dimulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan saran, penulisan sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian-uraian teori mengenai penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang definisi operasional variabel, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diuraikan penjelasan mengenai gambaran umum, hasil analisis penelitian dan hasil uji pengaruh dari variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan

audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas sistem pengendalian internal pada variabel dependen yaitu kinerja keuangan di Provinsi Papua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran dari penelitian.